

**PERAN MIGRANT CARE DALAM MENGADVOKASI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI
PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN**

2022-2024

ABSTRAK

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tahun 2022–2024 diiringi dengan masih tingginya kerentanan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama yang seringkali membayang-bayangi PMI non-prosedural. Meskipun telah terdapat regulasi nasional, kerjasama bilateral, serta kerangka regional, perlindungan terhadap PMI masih menghadapi kendala koordinasi dan penegakan hukum lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan mekanisme perlindungan oleh negara belum sepenuhnya menjangkau permasalahan yang dihadapi PMI, sehingga perlu adanya organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai aktor advokasi yang dapat memperkuat perlindungan melalui jaringan advokasi lintas negara. Melihat pada kondisi tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus TPPO PMI di Malaysia tahun 2022–2024. Penelitian ini dianalisis dengan teori Transnational Advocacy Networks (TANs) melalui elemen politik informasi, politik simbolik, politik leverage, dan politik akuntabilitas, serta konsep perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Migrant CARE berperan secara kontributif dalam memperluas ruang perlindungan PMI dengan mengangkat isu TPPO ke ranah transnasional, membangun solidaritas jaringan advokasi migran, dan mendorong tekanan kolektif kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia. Advokasi transnasional Migrant CARE tersebut berkontribusi dalam memperkuat perlindungan PMI yang lebih responsif, meskipun pencapaiannya tetap dipengaruhi oleh kemauan dari negara yang terlibat dan konsistensi penegakan hukum lintas negara.

Kata Kunci: Migrant CARE, TPPO, PMI, Malaysia, Jaringan Advokasi Transnasional

THE ROLE OF MIGRANT CARE IN ADVOCATING CASES OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES INVOLVING INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA FROM 2022 TO 2024

ABSTRACT

The increasing number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Malaysia from 2022 to 2024 has been accompanied by a persistently high vulnerability to cases of human trafficking crimes, particularly those that often affect non-procedural migrant workers. Although national regulations, bilateral cooperation, and regional frameworks have been established, the protection of Indonesian migrant workers still faces challenges related to coordination and cross-border law enforcement. This condition indicates that state protection mechanisms have not fully addressed the problems faced by migrant workers, thereby highlighting the need for non-governmental organization (NGO) as advocacy actors that can strengthen protection through transnational advocacy networks. In light of this situation, the aim of this research is to identify and describe the role of Migrant CARE in advocating PMI human trafficking cases in Malaysia from 2022 – 2024. This research is analyzed using the Transnational Advocacy Networks (TANs) theory through the elements of information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics, as well as the concept of human trafficking. The research employs a descriptive qualitative method by conducting interviews and document studies. The findings show that Migrant CARE plays a contributive role in expanding the protection space for Indonesian migrant workers by elevating the issue of human trafficking to the transnational level, building solidarity among migrant advocacy networks, and encouraging collective pressure on the governments of Indonesia and Malaysia. Migrant CARE's transnational advocacy contributes to strengthening more responsive protection for migrant workers, although its achievements remain influenced by the political will of the states involved and the consistency of cross-border law enforcement.

Keywords: Migrant CARE, Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Malaysia, Transnational Advocacy Networks